

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana Korupsi pada saat ini belum cukup memadai karena terdapat berapa kelemahan, selain di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 yang hanya merupakan peraturan kebijakan, juga masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum. Kedudukan hukum SEMA No. 4 Tahun 2011 itu sangat lemah dan diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation* dan sifatnya hanya mengatur ke dalam atau lingkup internal saja artinya SEMA adalah peraturan kebijakan dan hanya ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan. Konsep *statutory immunity* dan *plea bargain* yang ada di Amerika, sangat sesuai apabila diterapkan di Indonesia, terutama untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Adanya aturan yang tegas untuk melindungi saksi pelaku (*justice collaborator*) yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus, akan lebih memudahkan kinerja aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan. Langkah ke depan yang harus diatur adalah mekanisme untuk menetapkan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*, serta mekanisme untuk menentukan jenis perlindungan maupun *reward* yang akan diberikan. Inisiatif pelaporan bisa berasal dari *justice collaborator*

atau berasal dari Penegak Hukum. Dua kemungkinan ini tentunya akan memerlukan mekanisme yang berbeda.

2. Perbedaan antara *justice collaborator* dengan saksi mahkota dalam tindak pidana Umum adalah bahwa Saksi Mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam perkara yang berbeda (begitupula sebaliknya), sedangkan *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan DPR segera merevisi ketentuan Pasal 10 dan 10A UU No. 31 Tahun 2014 dan mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* serta pemberian reward yang jelas, karena peran *justice collaborator* sangat signifikan dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia.
2. Sebaiknya pengaturan mengenai *justice collaborator* dan persyaratannya tidak diatur dalam SEMA melainkan harus diatur dalam undang-undang dan memasukkannya ke dalam revisi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

